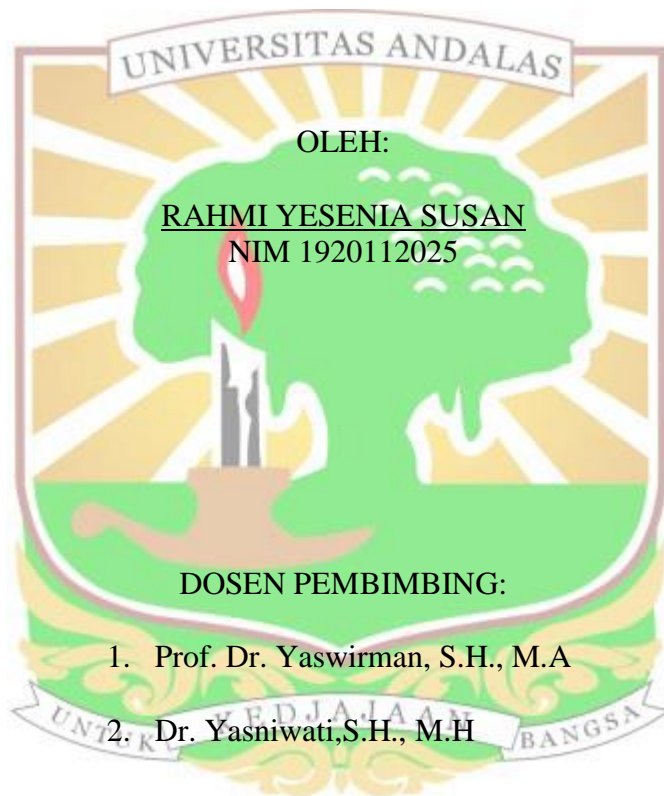


**PENGELOLAAN ZAKAT YANG BERSUMBER DARI BADAN
USAHA BERBADAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG No.23 TAHUN 2011 DI KOTA PADANG**

TESIS

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum*



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**PENGELOLAAN ZAKAT YANG BERSUMBER DARI BADAN USAHA
BERBADAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 23
TAHUN 2011 DI KOTA PADANG**

(Rahmi Yesenia Susan, 1920112025, Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2021, 125 Halaman)

ABSTRAK

Pasca kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial. Namun setelah 75 tahun merdeka Indonesia masih belum menuntaskan persoalan dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Salah satu hukum Islam yang telah berlaku sebagai hukum positif Indonesia adalah mengenai zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pelaksanaan zakat secara optimal seharusnya dapat membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang berlarut-larut. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu: 1) Apa dasar hukum adanya kewajiban zakat bagi badan usaha berbadan hukum di Indonesia 2) Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam mengumpulkan zakat badan usaha berbadan hukum; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam penyaluran zakat dalam meningkatkan daya guna zakat badan usaha berbadan hukum untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial; Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) Dasar hukum adanya kewajiban zakat bagi badan usaha berbadan hukum adalah kedudukannya sebagai subjek hukum bukan orang dan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa dalam setiap kekayaan terdapat hak orang lain; 2) BAZNAS Kota Padang bekerjasama dengan pemerintah Kota Padang dengan menerbitkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat dan melakukan beberapa pola pendekatan untuk meningkatkan jumlah muzaki badan usaha berbadan hukum yang ada di Kota Padang; 3) Dalam penyaluran zakat untuk meningkatkan daya guna zakat dari badan usaha untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan adalah BAZNAS melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui 5 program pokok yang dapat memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat. Beberapa program tersebut meliputi beberapa bidang yaitu: dakwah & advokasi; Padang Sehat; Pendidikan; Kemanusiaan; dan Ekonomi.

Kata kunci: Pengelolaan zakat, Badan Usaha, Keadilan dan Kesejahteraan, Badan Amil Zakat Kota Padang.

**ZAKAT MANAGEMENT WHICH COMES FROM BUSINESS ENTITIES
WITH LEGAL ENTITIES BASED ON LAW No. 23 YEAR 2011 IN PADANG
CITY**

(Rahmi Yesenia Susana, 1920112025, Andalas University Faculty of Law
Postgraduate Program, 2021, 125 Pages)

ABSTRACT

After independence, the Unitary State of the Republic of Indonesia runs the government based on the 1945 Constitution. As stated in the Preamble to the 1945 Constitution, the aim of the Indonesian state is to promote public welfare, educate the nation's life and social justice. However, after 75 (seventy five) years of independence, Indonesia still has not solved the problem of creating a just, prosperous and prosperous society. Indonesia as a country with a majority Muslim population cannot be separated from the rules that apply in Islamic law. One of the Islamic laws that have been applied as positive Indonesian law is regarding zakat which is regulated in Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management. The optimal implementation of zakat should be able to help solve the protracted problem of poverty. Based on the background of the problems described above, the research problems can be formulated, namely: 1) What is the pattern of approach taken by BAZNAS of Padang City in collecting zakat for legal entities; 2) What are the efforts made by the Padang City BAZNAS in distributing zakat in increasing the efficiency of zakat for legal entities to improve justice and social welfare; 3) What are the implications of paying zakat for business entities on the income tax obligations of business entities as taxpayers? In the research the author uses an empirical juridical approach, is descriptive. From the results of this study it is known that: 1) The legal basis for a business entity having an obligation to pay zakat is Law No. 23 concerning Zakat Management and the MUI Fatwa which was issued with a determination based on the word of Allah SWT, that in every wealth there are rights of others. 2) Padang City BAZNAS cooperates with the City government by issuing Regional Regulation No. 2 of 2010 concerning Zakat Management and carrying out several approaches to increasing the number of muzakki of bussines entities with legal entity in Padang City; 3) In the distribution of zakat to increase the efficiency of zakat from business entities to create justice and welfare, Baznas implements the distribution and utilization of zakat through 5 main programs that can improve the economic life of the community. Some of these programs cover several fields, namely: da'wah & advocacy; Healthy Field; Education; Humanity; and Economics.

Keywords: Management of zakat, business entities, justice and welfare, Badan Amil Zakat Nasional Padang.